

**EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
DALAM PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN**

Julia Dwiyanti¹, Benni Akhmad², Sitna Hajar Malawat³

¹Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska MAB, NIM19120272

²Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska MAB, NIDN1109089201

³Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska MAB, NIDN1113059101

Email : dwiyantijulia257@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan riset ini untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Sistem Pelayanan *Online Single Submission (OSS)* dalam Perizinan Berusaha di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui kendala yang menghambat Sistem OSS dalam izin berusaha di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Riset ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan penjabaran. Sumber informasi yang dipakai dalam riset ini berupa data primer dan data sekunder. Cara pengambilan informasi dengan pengamatan, interview, dan pengarsipan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Pelayanan OSS dalam izin berusaha di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hampir semua indikator dapat berjalan maksimal. Adapun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan efektivitas yakni masih terdapat masyarakat yang tidak sepenuhnya bisa mengakses sistem OSS

Kata Kunci : Online Single Submission (OSS), Perizinan Berusaha, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

REFERENSI

Buku:

Adrian Sutedi. (2017). *Peraturan Pengesahan di Bidang Bantuan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardiasmo. (2017). *Rilis Ketetapan Pajak terbaru*. Yogyakarta.

Moloeng, L.J. (2017). *Strategi Eksplorasi Subjektif*. Bandung: PT. Pemuda Rosdakarya.

Sugiyono. 2018. *Strategi Riset Kuantitatif, Riset dan Pengembangan*. Bandung: Alfabet.

Peraturan Undang-Undang:

UU No. 25 Tahun 2009 mengenai Administrasi Umum

Peraturan Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penciptaan Jabatan

Peraturan Nomor 4 Pasal 1 Tentang Penciptaan Jabatan

PP no. 95 Tahun 2018 mengenai Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

PP no. 5 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Izin Usaha Berbasis Bahaya.

PP no. 24 Tahun 2018 mengenai pengadaan izin usaha Terkoordinasi Secara Elektronik.

PP no. 96 Tahun 2012 pelaksanaan PP No. 25 Tahun 2009 mengenai Administrasi Umum

Jurnal:

Nurdiansyah, A., Andriani, R., dan Hastuti, D.P. (2019). *Intruksi Penyelenggaraan Administrasi Pemakaman di TPU Islam Tegal Alur Unit II Jakarta Barat*. Jurnal Sekretari dan Pengurus, 3 (1).

Skripsi

Adinda, (2021). *Kecukupan Administrasi Perizinan Dengan OSS Pada Dinas Penanaman Modal Dan Administrasi Terpadu Satu Pintu Di Kota Banda Aceh* (Pameran Doktor, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Wahyudi, Y.I. (2022). *Catatan Pemenuhan Wilayah Setempat untuk Administrasi Perizinan Berbasis Aplikasi OSS di Administrasi Spekulasi dan Administrasi Terpadu Satu Pintu di Peraturan Pinrang* (Doctoral Paper, Bosowa College).